

MONITORING DAN EVALUASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG																		
No	Tujuan/Sasaran /Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2025	Anggaran	Realisasi Kinerja 2025	Capaian Kinerja 2025 (%)	Realisasi Anggaran 2025	Capaian Anggaran 2025 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja					Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025
											ST	T	S	R	SR			
TUJUAN																		
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kawasan permukiman serta ketahanan terhadap perubahan iklim	1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	74,17		74,71	100			V					Uji Kualitas Air sudah dilaksanakan Semester I dan II (APBD dan APBN)	Perubahan PermenLH tentang IKLH mempengaruhi hasil indeks Kualitas Air/IKA	Kegiatan untuk Meningkatkan Kualitas Air Sungai dengan pengurangan beban pencemaran air
		2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	85		77,23	90,86			V					Sinergi dengan Kementerian LH dalam Pengujian Kualitas Udara Tahun 2025	Parameter PM 2,5 sebagai salah satu komponen IKU berdasarkan Data dari Kementerian Lingkungan Hidup sehingga menyebabkan nilai IKU Turun	Kegiatan untuk Meningkatkan Kualitas Udara
SASARAN																		
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim	1	Penurunan Emisi GRK (IUP)	TonCO2eq	793.727,99		691.149,92	87,08			V					Belum Optimalnya Potensi Penurunan Emisi dari sektor Limbah yaitu Pembangunan TPS3R	Belum ada penambahan data potensi Penurunan emisi dari Sektor lain seperti Pertanian, Perhubungan	Sektor lain seperti Pertanian, Perhubungan untuk dapat mengisi data kedalam aplikasi "Aksara" Bappenas
	Meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman	2	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman	%	71,7		71,11	99,18			V					Dukungan anggaran DAK Bidang Sanitasi untuk penyediaan infrastruktur dasar seperti SPALD-S dan TPS 3R Dukungan anggaran APBD dan CSR untuk kegiatan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2025 Layanan penyedotan Lumpur Tinja	Keterbatasan anggaran APBD dalam penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik sehingga pembangunan infrastruktur dasar dalam bidang sanitasi masih bertumpu dengan anggaran DAK Layanan penyedotan Lumpur Tinja belum dapat Terjadwal (L2T3)	Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi pendanaan dengan Disperakim Provinsi Jawa Tengah dan Pendanaan APBN program BSPPS, bantuan CSR dan bantuan Baznas Pengusulan kegiatan penyediaan/pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik melalui DAK Sanitasi Mengupayakan Layanan Penyedotan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2).
	Meningkatkan Kwalitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	3	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	78,50		85,67	100			V							
		4	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	74,50		74,9	100			V							
PROGRAM																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																		
	Program Pengembangan Perumahan					Rp. 306.119.500			Rp.265.650.448	86,77								
	Meningkatnya Hunian Layak	1	Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik	%	100		100	100			V					Keenam Rusunawa masih terhuni dan dimanfaatkan, serta operasional Rusunawa, baik layanan listrik maupun air masih dapat terlaksana dan terkelola	Terbatasnya alokasi anggaran untuk pemeliharaan dan perawatan Rusunawa	Mengoptimalkan pemeliharaan dan perawatan Rusunawa dengan alokasi anggaran yang ada berdasarkan skala prioritas dan tingkat kerusakan ringan
		2	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	100		100	100			V					Tidak ada korban bencana yang mengakibatkan relokasi		Penyediaan lahan relokasi masing-masing sebagai langkah mitigasi bencana pada area rawan bencana dan dukungan dari pihak Pemerintah Desa
		3	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	100		100	100			V					Tidak ada program pemerintah daerah yang menyebabkan relokasi rumah	warga calon penerima harus memiliki tanah untuk relokasi serta kemampuan keuangan daerah yang terbatas untuk melaksanakan relokasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah	

No	Tujuan/Sasaran /Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2025	Anggaran	Realisasi Kinerja 2025	Capaian Kinerja 2025 (%)	Realisasi Anggaran 2025	Capaian Anggaran 2025 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja					Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025
											ST	T	S	R	SR			
	Program Kawasan Permukiman					Rp. 1.192.231.300			Rp. 804.773.500	67,50								
	Meningkatnya Kawasan Permukiman	4	Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak	%	96,37		96,70	100			V					Penanganan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni berasal dari usulan Musrenbang dan Pokok-pokok pikiran DPRD melalui APBD, mengusulkan kegiatan pada Disperakim Provinsi Jawa Tengah, melalui pendanaan APBN program BSPS, bantuan CSR dan bantuan Baznas	Keterbatasan APBD dalam penanganan RTLH hanya mengandalkan hasil musrenbang dan usulan DPRD	Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi pendanaan dengan Disperakim Provinsi Jawa Tengah, pendanaan APBN program BSPS, bantuan CSR dan bantuan Baznas
		5	Persentase Luas kawasan kumuh yang tertangani	%	48,8		48,80	100			V					Kondisi kekumuhan di Kabupaten Temanggung masuk dalam kategori Kumuh sedang dan ringan, penanganan kumuh dari anggaran pusat dan provinsi untuk lokasi kawasan kumuh sesuai kewenangannya	Keterbatasan anggaran APBD dalam pembangunan infrastruktur kumuh, pendanaan provinsi dan pusat terbatas pada lokasi prioritas yang lebih membutuhkan penanganan	Mengusulkan kegiatan penanganan dari berbagai sumber anggaran, namun tahun 2025 ini belum ada program yang lolos seleksi
		6	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	%	66,88		68,38	100			V					Penanganan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni berasal dari usulan Musrenbang dan Pokok-pokok pikiran DPRD melalui APBD, mengusulkan kegiatan pada Disperakim Provinsi Jawa Tengah, melalui pendanaan APBN program BSPS, bantuan CSR dan bantuan Baznas	Keterbatasan APBD dalam penanganan RTLH hanya mengandalkan hasil musrenbang dan usulan DPRD	Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi pendanaan dengan Disperakim Provinsi Jawa Tengah, pendanaan APBN program BSPS, bantuan CSR dan bantuan Baznas
		7	Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga	%	79,93		78,79	98,57			V					Kemampuan masyarakat dalam menyediakan rumah layak huni secara mandiri Kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni oleh pemda, swasta/ CSR	Rumah tangga baru menikah belum memiliki rumah pribadi (masih menumpang orang tua) Keterbatasan kemampuan masyarakat dalam menyediakan rumah layak huni	Mendukung pengembang perumahan dalam menyelenggarakan rumah umu dan subsidi Mengusulkan program kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni dan pembangunan baru rumah layak hunimelalui berbagai sumber
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan					0			0									
	Terselesaikannya sengketa tanah garapan	8	Persentase Reforma Agraria yang Difasilitasi	%	100		100	100			V					Adanya koordinasi lintas sektor	Ketidapahaman masyarakat	sosialisasi
	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum					0			0									
	Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	9	Persentase Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	%	100		100	100			V					Adanya koordinasi lintas sektor	Sulit mendapatkan kesepakatan harga ganti rugi	Sosialisasi dan mediasi sejak awal program
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah					Rp. 6.655.398.000			Rp. 6.595.234.942	99,09								
	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	%	8,06		0,80	9,94			V					Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik sesuai SNI Penyedotan dan pengolahan lumpur tinja pada IPLT	Capaian cakupan rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Temanggung tahun 2025 menurun dipengaruhi adanya perubahan metode perhitungan sesuai ketentuan Bappenas pada hasil analisis Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK)	Pengusulan kegiatan penyediaan/pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik melalui DAK Sanitasi
		2	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM) (%)	%	100		100	100			V					Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik sesuai SNI Penyedotan dan pengolahan lumpur tinja pada IPLT	Keterbatasan anggaran APBD dalam penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik Akses sanitasi eksisting (tangki septik masyarakat belum SNI, tidak kedap) sehingga belum muncul kebutuhan/kesadaran penyedotan pada masyarakat	Pengusulan kegiatan penyediaan/pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik melalui DAK Sanitasi

No	Tujuan/Sasaran /Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2025	Anggaran	Realisasi Kinerja 2025	Capaian Kinerja 2025 (%)	Realisasi Anggaran 2025	Capaian Anggaran 2025 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja					Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025
											ST	T	S	R	SR			
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional					Rp. 2.526.245.500			Rp. 2.520.455.769	99,77								
	Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	3	Persentase jumlah TPS 3R	%	16,96		17,65	100			V					Pembangunan TPS 3R pada tahun 2025 sebanyak 5 unit		Fasilitasi pengajuan permohonan bantuan pembangunan TPS3R
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																		
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup					Rp. 43.643.400			Rp. 43.532.350	99,74								
	Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup	1	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	100		100	100			V					Tersusunnya Dokumen IKPLHD Kabupaten Temanggung Tahun 2025	Masih ada beberapa data yang belum terupdate dan belum lengkap	Koordinasi dan mengadakan rapat dengan tim teknis penyusunan Dokumen IKPLHD yang terdiri dari OPD teknis terkait
		2	Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	%	100		85,71	85,71				V				telah diterbitkannya 6 (enam) persetujuan pengelolaan lingkungan hidup terhadap kegiatan/usaha yang mengajukan permohonan yaitu: 1. Persetujuan DPLH Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Temanggung 2. Persetujuan PKPLH Kegiatan Perbaikan Dinding Penahan Tebing (DPT) dan Groundsill Sungai Galeh oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak 3. Persetujuan DPLH Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas oleh CV Sido Agung Mulia Kandang Kedu 4. Persetujuan DPLH Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas oleh CV Sido Agung Mulia Kandang Kaloran 5. Perubahan SKKLH PT. Djarum 6. Persetujuan PKPLH Pembangunan Embung Geblog	Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang membutuhkan penyesuaian dalam regulasi dan pelaksanaan proses penerbitan Persetujuan Lingkungan Pengajuan permohonan persetujuan lingkungan dengan penyusunan dph Laboratorium Kesehatan Temanggung masih dalam proses perbaikan dokumen	melakukan koordinasi dengan DPMP TSP, DLHK Provinsi dan KLH
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup					Rp. 337.157.200			Rp. 328.101.832	97,31								
	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	angka	60,02		60,15	100			V					Potensi penambahan nilai IKL dari Deliniasi Ruang Terbuka Hijau/RTH meskipun koefisien perhitungannya relatif kecil yakni 0,005	Perhitungan menggunakan proyeksi Citra Satelit sehingga sangat dimungkinkan ada perubahan luasan Tutupan Lahan sehingga mempengaruhi nilai IKL	Penambahan luasan Ruang Terbuka Hijau/RTH dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
		4	Luas Lahan kritis tertangani	%	3,75		33.125	100			V					1. Kondisi cuaca tahun 2025 yang masih cukup banyak hujan (kemarau basah) mendukung kegiatan penanaman secara mandiri oleh Desa/komunitas, sehingga dapat dilaksanakan sepanjang tahun; 2. Persediaan bibit dari tahun sebelumnya masih cukup untuk melayani permohonan dari masyarakat	stok bibit tanaman yang tersedia jenisnya terbatas sehingga permohonan dari masyarakat untuk kegiatan penanaman tidak dapat diakomodir secara maksimal	1. Melakukan perawatan sisa bibit yang tersisa; 2. Sosialisasi terkait kesadaran untuk turut serta melakukan kegiatan konservasi.
		5	Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola	%	7,08		7,08	100			V					Beberapa mata air digunakan sebagai sumber air baku PDAM dan PAMSIMAS, sehingga mata air sudah dikelola oleh beberapa pihak	Belum ada kegiatan inventarisasi mata air yang terupdate.	
		6	Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab Temanggung	%	20,9		30,23	100			V					Pelaksanaan pengambilan contoh uji dilaksanakan sesuai jadwal	Kondisi Cuaca Alat Transportasi (terkendala mobil meminjam dari bidang lain)	Melaksanakan pengambilan contoh uji sesuai jadwal yang telah direncanakan
		7	Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung	%	15,7		15,69	99,91			V					Pelaksanaan pengambilan contoh uji dilaksanakan sesuai jadwal	Kondisi Cuaca, Alat Transportasi (terkendala mobil meminjam dari bidang lain)	Melaksanakan pengambilan contoh uji sesuai jadwal yang telah direncanakan

No	Tujuan/Sasaran /Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2025	Anggaran	Realisasi Kinerja 2025	Capaian Kinerja 2025 (%)	Realisasi Anggaran 2025	Capaian Anggaran 2025 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja					Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025
											ST	T	S	R	SR			
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati					Rp. 306.169.700			Rp. 301.840.103	98,58								
	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	8	Persentase RTH publik Kabupaten yang terpelihara	%	74		81,70	100			V							
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)					Rp. 6.337.500			Rp. 6.257.600	98,73								
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	9	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	%	100		100	100			V					Metode pengawasan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung sesuai peraturan yang berlaku. Adanya pengawasan bersama baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.	Masih kurangnya kesadaran pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Adanya pembaruan instrumen peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang masih berproses dan belum tersosialisasikan ke daerah.	Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan terkait pembaruan peraturan yang terbit terkait pengelolaan lingkungan hidup.
		10	Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air	%	100		100	100			V					Metode pengawasan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung sesuai peraturan yang berlaku. Adanya pengawasan bersama baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.	Masih kurangnya kesadaran pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Adanya pembaruan instrumen peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang masih berproses dan belum tersosialisasikan ke daerah.	Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan terkait pembaruan peraturan yang terbit terkait pengelolaan lingkungan hidup.
		11	Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara	%	100		100	100			V					Metode pengawasan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung sesuai peraturan yang berlaku. Adanya pengawasan bersama baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.	Masih kurangnya kesadaran pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Adanya pembaruan instrumen peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang masih berproses dan belum tersosialisasikan ke daerah.	Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan terkait pembaruan peraturan yang terbit terkait pengelolaan lingkungan hidup.
	Program Peningkatan Pendidikan. Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat					0			0									
	Meningkatnya Pendidikan. Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	12	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	%	30,26		30,80	100			V					1. Sinergitas antara DPRKPLH dengan instansi terkait serta Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan Sekolah yang berwawasan lingkungan serta peran serta Sekolah Adiwiyata untuk melaksanakan pembinaan terhadap sekolah lain dalam upaya mewujudkan sekolah berwawasan lingkungan 2. Tahun 2025 Sekolah Adiwiyata Kabupaten bertambah sebanyak 14 Sekolah	Rendahnya minat sebagian sekolah di Kabupaten Temanggung untuk mengikuti Program Sekolah Adiwiyata	1. Memaksimalkan potensi Sekolah di Kabupaten Temanggung untuk menjadi Sekolah Adiwiyata 2. Melakukan sosialisasi ke sekolah tentang pentingnya penerapan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS) serta melakukan koordinasi dengan SKPD terkait (Kemenag dan Dindikpora) untuk dapat diterapkan di sekolah dan madrasah
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat					Rp. 16.671.400			Rp. 16..652.532	99,88								

No	Tujuan/Sasaran /Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2025	Anggaran	Realisasi Kinerja 2025	Capaian Kinerja 2025 (%)	Realisasi Anggaran 2025	Capaian Anggaran 2025 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja					Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025
											ST	T	S	R	SR			
	Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	13	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	%	100		100	100			V					Usulan Penghargaan dalam bidang lingkungan hidup yang sudah diajukan sampai dengan triwulan IV tahun 2025: 1. Penghargaan Kalpataru 2. Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah 3. Penghargaan ProKlim 4. Sekolah Adiwiyata Kabupaten Temanggung 5. Sekolah Adiwiyata Nasional 6. Sekolah Adiwiyata Mandiri Penghargaan dalam bidang lingkungan hidup yang sudah diperoleh sampai dengan triwulan IV tahun 2025: 1. Sekolah Adiwiyata Kabupaten Temanggung Tahun 2025 2. Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 3. Penghargaan Kalpataru Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 4. Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2025. 5. Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2025. 6. Apresiasi Inovasi ProKlim Provinsi Jawa Tengah	Informasi terkait dengan penghargaan sebagian besar diumumkan pada akhir tahun Ada beberapa penghargaan yang tidak diselenggarakan tiap tahun	1. Mengusulkan keikutsertaan dalam penghargaan dalam bidang lingkungan hidup lainnya baik tingkat provinsi maupun nasional 2. Melaksanakan sosialisasi mengenai penghargaan terkait lingkungan hidup 3. Melakukan verifikasi terhadap calon usulan 4. Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap usulan yang diajukan 5. Berkordinasi dengan pusat/provinsi terkait penyelenggaraan penghargaan
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup					0			0									
	Meningkatnya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	14	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100		100	100			V					Adanya sikap kooperatif dan pemantauan bersama dampak lingkungan hidup baik dari pemrakarsa usaha, ,masyarakat dan OPD terkait Penyelesaian aduan masyarakat secara musyawarah antara pihak pengadu dengan pihak yang diadakan melalui fasilitasi pemerintah Desa	Masih kurangnya kesadaran atau empati masyarakat atau pemrakarsa usaha adan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga dampaknya mengganggu masyarakat sekitar. Adanya aduan masyarakat yang berasal dari dampak kegiatan usaha kecil atau konflik sosial di masyarakat sehingga penanganannya tidak dapat menggunakan instrumen peraturan lingkungan hidup dan penanganannya melalui pendekatan sosial.	Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan terkait pengelolaan lingkungan hidup.
	Program Pengelolaan Persampahan					Rp. 6.266.970.700			Rp. 5.995.936.245	95,67								
	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	15	Timbulan sampah terolah difasilitasi pengolah sampah	%	33,34		33,84	100			V					Bertambahnya fasilitas pengelolaan sampah seperti TPS 3R dan meningkatnya pengelolaan sampah di fasilitas yang sudah ada	Terdapat beberapa TPS3R yang tidak berfungsi optimal Terdapat bank sampah yang tidak melaporkan pengelolaan sampahnya	Monitoring dan evaluasi keberfungsian TPS3R dan TPSD Fasilitasi pengajuan permohonan bantuan sarpras pengelolaan sampah

No	Tujuan/Sasaran/Program	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2025	Anggaran	Realisasi Kinerja 2025	Capaian Kinerja 2025 (%)	Realisasi Anggaran 2025	Capaian Anggaran 2025 (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja					Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2025
											ST	T	S	R	SR			
		16	Persentase sampah yang terkelola	%	63,27		63,28	100			V					Bertambahnya fasilitas pengelolaan sampah seperti TPS 3R dan meningkatnya pengelolaan sampah di fasilitas yang sudah ada	Terdapat beberapa TPS3R yang tidak berfungsi optimal Terdapat bank sampah yang tidak melaporkan pengelolaan sampahnya	Monitoring dan evaluasi keberfungsian TPS3R dan TPSD Sosialisasi pengelolaan sampah dari sumber Fasilitasi pengajuan permohonan bantuan sarpras pengelolaan sampah Koordinasi dengan desa yang belum melaksanakan pengelolaan sampah
		17	Cakupan Pelayanan persampahan	%	76,12		76,47	100			V					Terdapat penambahan jumlah desa yang melakukan pengangkutan sampah secara mandiri ke TPA		Koordinasi dengan desa yang belum melaksanakan pengelolaan sampah
JUMLAH INDIKATOR TUJUAN				2				95,43			2	0	0	0	0			
JUMLAH INDIKATOR SASARAN				4				98,94			3	1	0	0	0			
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM				29				96,34			27	1			1			
				35				96,90			32	2			1			

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Interval Nilai Realisasi
Sangat Tinggi	91% ≤ 100%
Tinggi	76% ≤ 90%
Sedang	66% ≤ 75%
Rendah	51% ≤ 65%
Sangat Rendah	≤ 50%

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Temanggung.



Prasodjo, S.Ag., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196604021989031013